Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)
p-ISSN 2774-5147 | e-ISSN 2774-5155

Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Kasongan

Iin Natalia, Herwin Sutrisno, Yuli Ruthena, Indrawan Permana, Theresia Susi
Universitas Palangkaraya, Indonesia
Email: iinlovededy@gmail.com, herwin.sutrisno@arch.upr.ac.id, yuliruthena74@gmail.com, indrakamis@arch.upr.ac.id, theresia.susi@arcupr.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Namun, di banyak daerah, termasuk Kota Kasongan, pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala baik secara teknis maupun kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pengelolaan sampah di Kota Kasongan sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah di Kota Kasongan secara umum masih dinilai belum optimal oleh masyarakat. Aspek teknik operasional yang mencakup pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah berada pada kategori sedang, sedangkan aspek kelembagaan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan regulasi dinilai belum sesuai dengan harapan. Hasil wawancara mendalam mengungkapkan adanya kendala struktural dan fungsional dalam sistem pengelolaan sampah, seperti kelembagaan yang belum terstruktur dengan baik, kurangnya transparansi dalam pembiayaan, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta lemahnya regulasi dan pengawasan yang ada. Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya intervensi komprehensif melalui penguatan tata kelola kelembagaan dengan struktur organisasi yang jelas dan sistem koordinasi antarinstansi yang terintegrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan melalui sosialisasi sistem retribusi yang terstruktur, intensifikasi program edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, serta penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang konsisten.

Kata kunci: Kinerja, Pengelolaan Sampah, Kota Kasongan

Abstract

Waste management is an important aspect in creating a clean, healthy, and sustainable environment. However, in many areas, including Kasongan City, waste management still faces various technical and institutional obstacles. This study aims to determine the extent of waste management performance in Kasongan City so that more appropriate improvement measures can be formulated. This study uses a qualitative research method. The data collection techniques used in this study are observation and interviews. The analysis technique used in this study is qualitative descriptive analysis. The results show that the community generally considers waste management performance in Kasongan City to be suboptimal. The technical operational aspects, which include waste containment, collection, and transportation, are rated as moderate, while the institutional aspects, financing, community participation, and regulations are considered to be below expectations. In-depth interviews revealed structural and functional constraints in the waste management system, such as poorly structured institutions, lack of transparency in financing, low public awareness and participation, and weak regulations and supervision. The of these research findings indicate the need for comprehensive intervention through strengthening institutional governance with clear organizational structures and integrated inter-agency coordination systems, increasing transparency and accountability in financing through structured retribution system socialization, intensifying education and community empowerment programs to enhance active participation in waste management, and strengthening regulations and consistent monitoring mechanisms.

Keywords*: Performance, Waste Management, Kasongan City*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah telah menjadi isu global yang mendesak seiring dengan pertumbuhan populasi dunia dan peningkatan aktivitas ekonomi (Lingga et al., 2024). Menurut data Bank Dunia (2018), produksi sampah global mencapai 2,01 miliar ton per tahun dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050 jika tidak ada intervensi signifikan dalam pengelolaan sampah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sustainable Development Goals (SDGs) telah menetapkan target khusus untuk mengatasi permasalahan sampah, khususnya dalam SDGs 11 mengenai kota dan komunitas berkelanjutan serta SDGs 12 tentang pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Fandira et al., 2023). Di tingkat regional Asia-Pasifik, negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pengelolaan sampah karena keterbatasan infrastruktur, pembiayaan, dan kapasitas kelembagaan. Konteks global ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan teknis operasional, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang memerlukan pendekatan sistemik dan terintegrasi (Kasyfilham & Al Akbar, 2025; Yuliana, 2025).

Kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, tempat tinggal penduduk, pusat pendidikan dan sebagainya, diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan serta merangsang perkembangan wilayah perdesaan disekitarnya (Sari & Mardiansjah, 2022). Suatu desa pada akhirnya karena pembangunannya secara bertahap dapat berubah menjadi kota. Peran kota sebagai pusat pertumbuhan serta perkembangan wilayah hinterland-nya dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk di kota-kota besar (M. Sari, 2021).

Pembangunan suatu kota membawa dampak yang positif bagi kemajuan suatu daerah dan tentunya dengan kemajuan tersebut ada dampak negative juga yang muncul dari hal tersebut (Pida et al., 2025). Salah satu dampak negative terhadap lingkungan adalah mengenai masalah sampah (Erika & Gusmira, 2024; Rafi & Perkasa, 2023). Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/ pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar (Nugroho, 2013). Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam masalah. Untuk itu masalah sampah harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara khusus sehingga dapat tertangani dengan baik. Penanganan dan pengelolaan masih lemah, salah satunya dikarenakan kebijakan atau program pengelolaan yang kurang terintegrasi serta kurangnya dukungan dan peran serta masyarakat, baik dunia usaha maupun masyarakat umum (Gobai et al., 2020).

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008). Menurut Diyah (2025), pengelolaan sampah meupakan aktivitas untuk mengelola sampah dari awal hingga pembuangan, meliputi pengumpulan, pengangkutan, perawatan, dan pembuangan, diiringi oleh monitoring dan regulasi manajemen sampah (Diyah et al., 2025).

Pengelolaan sampah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah spesifik diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Wati et al., 2025). Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas

konsumsi dan produksi yang telah dilakukan (SDGs 12) (Rahmatullah & Verawati, 2024). Konsumsi yang berlebih tentunya akan menghasilkan sampah yang berlebih sehingga mempengaruhi luasan tempat pembuangan sampah yang ada (C. N. Sari et al., 2023). Susilawati (2024) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang (Susilawati et al., 2024). Dispesifikan dalam Brundtland Report dalam tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Kurniawan & Fuaddah, 2024; Rahmawati & Syamsu, 2021). Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dari perspektif ekonomi, maka dipertimbangkan cara untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam (Amsari et al., 2024). Kebijakan Pengelolaan sampah, seperti bank sampah dapat dijadikan upaya mengurangi jumlah timbunan sampah yang dimuat ke TPA dan membantu perekonomian masyarakat, yang mana hasil penjualan sampah disimpan dalam bentuk tabungan di bank sampah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan dapat memengaruhi tercapainya target SDGs, terutama SDGs ke 1, 8 dan 12 (Widyastuti et al., 2024).

Secara nasional data timbulan sampah di Indonesia sebagai penghasil sampah terbesar kedua setelah Cina. Indonesia menduduki urutan ke 5 penghasil sampah plastik terbesar di dunia dengan jumlah 9,13 juta ton. Indonesia juga menempati urutan ke lima dunia sebagai negara pembuang sampah plastik ke laut dengan volume 56.333 ton (Aisha, 2023). Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023 hasil input dari 373 kabupaten/kota se Indonesia menyebutkan jumlah timbulan sampah 39.737.086,45 juta ton, sampah terkelola 60,85 % (24.181.744,42 juta ton), pengurangan sampah 13,61% (5.406.922,21 juta ton), penanganan sampah 47,25 % (18.774.822,21 juta ton) dan sampah tidak terkelola 39,15% (15.555.342,03 juta ton) (SIPSN, 2023).

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 adalah kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Peraturan ini ditetapkan pada 23 Oktober 2017 dan diundangkan pada 24 Oktober 2017. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan target pengelolaan sampah pada tahun 2025, yaitu 100% sampah terkelola dengan baik dan benar. Target ini dicapai dengan mengurangi sampah sebesar 30% dan menangani sampah sebesar 70%. Kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya disebut Jakstranas. Jakstranas merupakan arah kebijakan dan strategi yang terpadu dan berkelanjutan dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga.

Secara teknis, pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih banyak yang menggunakan pendekatan yang belum terintegrasi antara di sisi hulu dan hilir termasuk harmonisasi aspek teknis dan finansialnya. Beberapa daerah masih fokus pada penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dari aspek penganggaran, rata-rata komitmen anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia untuk pengelolaan sampah masih sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 1% dari total APBD. Menurut kajian konsultan di Direktorat PDPPI komitmen anggaran untuk pengelolaan sampah semestinya ditingkatkan menjadi berkisar 3-5 % dari total anggarannya. Lebih lanjut, untuk membantu dari dimensi pembiayaan dan pendanaan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, memberi perhatian khusus

untuk sektor pengelolaan sampah melalui pemberian PDF untuk proyek-proyek pengeloaan sampah yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang mana saat ini sebagian besar masih fokus pada pengelolaan akhir (sisi hilir).

Hal ini ditegaskan juga dalam Nota Keuangan 2022 yang telah menyatakan bahwa pengelolaan sampah sudah menjadi salah satu sektor prioritas yang akan didorong dengan skema KPBU. Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kota berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang baik dapat membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berkelanjutan.

Dampak yang ditimbulkan dari sampah apabila tidak dikelola dengan baik adalah terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup, dampak penurunan kesehatan masyarakat, menurunnya estetika lingkungan dan terjadinya pemanasan global. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan perhatian yang besar terhadap dampak pemanasan global. Secara international mitigasi pemanasan global dimuat didalam Protocol Kyoto yang mengatur kewajiban pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bagi negara industri maju. Didalam pengelolaan sampah tentu saja tidak hanya menjadi dari tanggungjawab Pemerintah saja tetapi juga partisipasi masyarakat sangat berperan penting juga dalam menciptakan pengelolaan sampah yang baik. Masyarakat harus memiliki rasa kepedulian dan kesadaran yang tinggi terhadap pengelolaan sampah agar tercipta lingkungan yang indah dan bersih.

Keberadaan dinas teknis dan masyarakat yang telah melakukan berbagai upaya seperti penambahan bak sampah dan TPS, transfer depo, rute jalur pengangkutan sampah dan penambahan personil belum mampu untuk menangani persampahan kota. Hal ini ditandai dengan kondisi di lapangan masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, contohnya belum terlayaninya semua masyarakat kota tentang pengelolaan persampahan karena terbatasnya sarana prasarana. Dengan tidak terlayani dengan maksimal dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Salah satu pelayanan publik adalah pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan. Dalam pelayanan pengelolaan sampah dibutuhkan kinerja atau performance yang baik seperti dalam frekuensi pengangkutan, jumlah personil maupun jumlah peralatan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan (Hakim & Abdullah, 2024). Oleh karena itu, perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terintegrasi serta didukung oleh semua lapisan masyarakat. Sikap masyarakat yang masih tidak peduli dengan sampah harus diubah, begitu pula komponen-komponen penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah, semuanya harus berubah menjadi lebih baik (Triani, 2017).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan pengelolaan sampah perkotaan dari berbagai perspektif. Triani (2017) dalam penelitiannya di Kota Palangka Raya mengidentifikasi bahwa kinerja pengelolaan sampah dipengaruhi oleh keterbatasan personil, sarana prasarana, operasional pengangkutan yang belum optimal, pembagian tugas yang kurang jelas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian Gobai et al. (2020) di Kota Nabire, Papua, menemukan bahwa lemahnya pengelolaan sampah disebabkan oleh kebijakan yang kurang terintegrasi serta minimnya dukungan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Hadomuan & Tuti (2022) melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota

Tangerang Selatan dengan fokus pada aspek kelembagaan dan regulasi, menemukan bahwa koordinasi antarinstansi dan konsistensi implementasi kebijakan menjadi faktor krusial. Sementara itu, Anastasia & Arif (2022) menggunakan analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) untuk merumuskan strategi pengelolaan sampah di Kota Mojokerto, mengidentifikasi pentingnya pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. Lebih spesifik, Thamrin et al. (2022) mengevaluasi pengelolaan sampah di Kota Gorontalo dengan menekankan aspek teknis operasional dan pembiayaan sebagai determinan utama kinerja sistem. Dari berbagai penelitian tersebut, teridentifikasi bahwa permasalahan pengelolaan sampah perkotaan bersifat multidimensional, mencakup aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan regulasi yang saling terkait dan memerlukan pendekatan sistemik dalam penanganannya.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah perkotaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di kota-kota kecil yang mempunyai kepadatan cukup tinggi dan adanya aktifitas perekonomian yang tinggi juga. Kota Kasongan yang merupakan kategori kota kecil yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Katingan saat ini juga mengalami permasalahan dalam pengelolaan sampah. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya sampah-sampah yang dibuang dengan sembarangan dan sering tertumpuknya sampah pada TPS tertentu. Dari sisi jangkauan pelayanan pengelolaan sampah, sampai saat ini masih terbatas pada jalan-jalan utama dan pasar, sedangkan pada daerah permukiman penduduk masih belum semuanya terjangkau. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat, volume sampah yang dihasilkan juga akan bertambah. Dari data yang diperoleh berdasarkan SIPN pada Tahun 2023 Kabupaten Katingan memiliki timbulan sampah harian 65,60 ton, dan timbulan sampah per tahun sebesar 23.942,39 ton.

Pengurangan sampah tahunan sebesar 8,22 (ton/tahun), penanganan sampah tahunan 4.411,15 (ton/tahun), sampah terkelola tahunan 4.419,37 (ton/tahun). Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pendahara Baru Sampah masuk sebesar 4.079,73 ton/tahun dan sampah masuk Landfill 4.079,73 ton/tahun. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan sampah di Kabupaten Katingan, khususnya Kota Kasongan, masih sangat rendah dengan hanya 18,46% (4.419,37 dari 23.942,39 ton) sampah yang terkelola, jauh di bawah target nasional sebesar 70% penanganan sampah sesuai Perpres 97/2017. Kesenjangan yang signifikan ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar dalam sistem pengelolaan sampah yang memerlukan evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih baik dalam pengelolaan sampah guna menjaga kebersihan kota Kasongan. Berdasarkan pada permasalahan seperti tersebut di atas, ada indikasi pengelolaan sampah di Kota Kasongan saat ini belum optimal.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan pengelolaan sampah di berbagai kota di Indonesia, namun penelitian spesifik yang menganalisis kinerja pengelolaan sampah di kota-kota kecil dengan karakteristik unik seperti Kota Kasongan masih terbatas. Research gap yang teridentifikasi meliputi: (1) minimnya kajian empiris tentang kinerja pengelolaan sampah di kota-kota kecil yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan, (2) belum adanya penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan persepsi masyarakat dengan evaluasi sistem kelembagaan dalam konteks

pengelolaan sampah kota kecil, dan (3) kurangnya kajian yang memberikan rekomendasi praktis dan aplikatif untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas kota kecil. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dan memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kinerja pengelolaan sampah di Kota Kasongan khususnya, serta kota-kota kecil lainnya pada umumnya.

Dalam penelitian ini, akan diteliti lebih lanjut mengenai kinerja pengelolaan sampah Kota Kasongan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah di Kota Kasongan dari perspektif masyarakat sebagai penerima layanan, (2) mengidentifikasi kendala-kendala struktural dan fungsional dalam sistem pengelolaan sampah, dan (3) merumuskan rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja pengelolaan sampah yang aplikatif dan sesuai dengan kapasitas serta kondisi lokal Kota Kasongan. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur tentang pengelolaan sampah perkotaan khususnya di kota-kota kecil, sementara manfaat praktisnya adalah memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program peningkatan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melihat kondisi faktual pengelolaan sampah saat ini dan mengacu pada kondisi ideal yang diharapkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan kota Kasongan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menitikberatkan pada pengamatan secara mendalam. Penerapan metode ini dalam penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap suatu fenomena. Pendekatan kualitatif yang berfokus pada aspek humanisme, individu, serta perilaku manusia lahir dari kesadaran bahwa setiap tindakan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor internal. Faktor-faktor tersebut mencakup kepercayaan, pandangan politik, maupun latar belakang sosial individu yang bersangkutan. Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Kasongan Lama dan Kasongan Baru (Achjar et al., 2023).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Kasongan dengan mendetail dan komprehensif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang karakteristik, fungsi, dan fenomena yang tengah dikaji (Yin, 2018). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dan wawancara. Pengambilan populasi sampel terhadap penelitian Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Kasongan dengan lokasi studi pengelolaan sampah di Kelurahan Kasongan Lama dan Kasongan Baru. Diketahui jumlah penduduk di 2 (dua) Kelurahan Kasongan Lama dan Kelurahan Kasongan Baru berjumlah 19.466 jiwa. Total populasi dalam penelitian ini berjumlah 19.466 jiwa. Secara umum, jumlah ukuran sampel yang dibutuhkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Slovin.

Agar pemilihan responden dapat mewakili seluruh sampel yang ditetapkan, maka teknik yang digunakan untuk memilih responden adalah teknik Stratified Random Sampling. Jumlah populasi dari Kelurahan Kasongan lama dan Kasongan Baru sejumlah 9.957 jiwa. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 penduduk yang berada di Kecamatan Kasongan Lama dan Kasongan Baru di Kota Kasongan. Teknik analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah menjadi salah satu aspek krusial dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, terutama di wilayah perkotaan yang terus mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi (Lingga et al., 2024). Permasalahan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga penurunan kualitas hidup warga. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja pengelolaan sampah menjadi langkah strategis untuk menilai seberapa efektif sistem yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola sampah (Hadomuan & Tuti, 2022; Thamrin et al., 2022).

Evaluasi ini mencakup berbagai aspek penting, di antaranya teknis operasional, kelembagaan, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat (Anastasia & Arif, 2022). Setiap aspek ini memiliki peran signifikan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Evaluasi kinerja pengelolaan sampah dapat dilakukan dari dua sudut pandang, yaitu pertama, melalui perbandingan dengan standar normatif, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait persampahan atau referensi dari kajian literatur yang relevan, atau melalui evaluasi berdasarkan persepsi masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah.

Penilaian dalam studi ini menggunakan pandangan publik, mengingat masyarakat lah yang merasakan konsekuensi langsung dari sistem yang diterapkan. Penilaian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat, yang disusun berdasarkan skala tertentu untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan kepuasan terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada. Persepsi yang dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan variabel-variabel utamanya. Hasil evaluasi ini kemudian dibagi menjadi beberapa bagian.

1. Teknik Operasional

   Teknik operasional merupakan aspek fundamental yang menentukan kelancaran proses dari sumber timbulan sampah hingga ke tempat pembuangan akhir. Teknik operasional ini mencakup tiga komponen utama, yaitu pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan. Ketiganya saling berkaitan dan harus berjalan secara efektif agar pengelolaan sampah di suatu wilayah dapat terlaksana dengan baik (Yacadewa & Musa'ad, 2021). Respons masyarakat mengenai teknik operasional sampah di Kota Kasongan disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Respons Masyarakat Terhadap Teknik Operasional Sampah di Kota Kasongan

Aspek yang dinilai	Skor	Persentase (%)	Kategori		
			Rendah	Sedang	Tinggi
Standar penyediaan tempat sampah (pewadahan)	191	64%		√	
Jadwal dan rute pengumpulan sampah	148	49%		√	
Kegiatan pengangkutan sampah oleh petugas	195	65%		√	
Rata-rata	178	59%		√	

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan Tabel 1 yang menyajikan respons masyarakat terhadap teknik operasional pengelolaan sampah di Kota Kasongan, dapat dilihat bahwa sebagian besar aspek yang dinilai masih berada dalam kategori sedang. Dari data yang ditampilkan, aspek pewadahan memperoleh skor sebesar 191, yang mencerminkan 64% dari total penilaian dan dikategorikan sedang. Nilai ini mengindikasikan bahwa penyediaan tempat sampah baik dari segi jumlah maupun kualitas, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, untuk aspek jadwal dan rute pengumpulan sampah, skor yang diperoleh adalah 148 atau sekitar 49%, juga masuk dalam kategori sedang. Skor menunjukkan bahwa masyarakat menilai pengumpulan sampah oleh petugas belum dilakukan secara konsisten dan efisien. Sementara itu, kegiatan pengangkutan sampah oleh petugas mendapatkan skor tertinggi yaitu 195 atau 65%, namun tetap berada dalam kategori sedang. Meskipun dinilai sedikit lebih baik dibanding dua aspek sebelumnya, hal ini tetap mencerminkan bahwa kegiatan pengangkutan masih belum optimal.

Kondisi teknis operasional yang berada pada kategori sedang ini memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Kasongan. Keterbatasan pewadahan mengakibatkan penumpukan sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya, yang berpotensi menjadi sumber pencemaran udara akibat bau tidak sedap, perkembangbiakan vektor penyakit seperti lalat dan tikus, serta menciptakan pemandangan yang tidak estetis. Inkonsistensi jadwal pengumpulan menyebabkan sampah tertinggal di lingkungan pemukiman dalam waktu yang lama, meningkatkan risiko pencemaran tanah dan air, terutama pada musim hujan ketika lindi (leachate) dari sampah dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air tanah yang digunakan masyarakat. Dari perspektif kesehatan masyarakat, kondisi ini berkontribusi terhadap peningkatan prevalensi penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan penyakit kulit, sebagaimana dilaporkan dalam berbagai studi epidemiologi lingkungan. Selain itu, aspek sosio-ekonomi juga terdampak, dimana lingkungan yang kotor menurunkan nilai properti, menghambat aktivitas ekonomi lokal, dan menciptakan stigma negatif terhadap wilayah yang dapat menghambat investasi dan pengembangan ekonomi lokal (Damiti et al., 2024; Lingga et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden masyarakat di Kota Kasongan, berbagai keluhan muncul terkait teknik operasional pengelolaan sampah yang dirasa belum optimal. Beberapa warga menyampaikan pendapat secara langsung mengenai kondisi di lapangan. Seorang responden menyatakan, *"Menurut saya, tempat sampah yang disediakan masih sangat kurang dan tidak sesuai, apalagi di lingkungan tempat tinggal kami yang padat. Kadang kami bingung harus buang sampah ke mana."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa sarana pewadahan sampah belum memadai baik dari segi jumlah, kualitas, maupun persebarannya.

Masalah juga muncul pada proses pengumpulan sampah. Seorang ibu rumah tangga menyampaikan, *"Pengambilan sampah tidak menentu, kadang petugas datang, kadang tidak. Jadi, sampah menumpuk dan bikin bau di depan rumah."* Pernyataan ini mencerminkan ketidakkonsistenan jadwal pengumpulan, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan potensi gangguan kesehatan di lingkungan sekitar.

Dari aspek pengangkutan, responden lain menyampaikan, *"truk sampah jarang masuk ke*

daerah kami. Kalau pun datang, tidak semua sampah diangkut karena sudah penuh duluan." Keluhan ini memperlihatkan bahwa pengangkutan sampah belum menjangkau semua wilayah secara merata, dan armada yang tersedia tidak mencukupi untuk menampung volume sampah yang ada.

Wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, petugas kebersihan, dan perwakilan pemerintah daerah turut menguatkan temuan tersebut. Salah satu petugas kebersihan mengungkapkan, *"Volume sampah sekarang sudah melebihi kapasitas truk. Kadang satu kali angkut saja tidak cukup, harus bolak-balik."* Selain itu, ia juga menambahkan bahwa jadwal kerja yang padat dan kendaraan yang sering bermasalah menyulitkan dalam menjalankan tugas secara maksimal.

Perwakilan dari pemerintah daerah juga menyampaikan, *"Kami memang kekurangan armada, dan itu sudah menjadi perhatian. Tapi kami juga terkendala dengan anggaran dan sumber daya manusia untuk menanganinya."* Pernyataan ini mencerminkan bahwa kendala teknis dan struktural menjadi faktor utama yang menghambat kelancaran teknik operasional pengelolaan sampah di Kota Kasongan.

Berdasarkan pendapat para responden menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan aspek teknis operasional, terutama dalam penyediaan tempat sampah, penjadwalan pengumpulan yang konsisten, dan pengangkutan yang merata serta memadai. Masukan langsung dari warga dan pelaksana di lapangan menjadi bahan penting bagi perbaikan sistem agar pengelolaan sampah di Kota Kasongan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Kelembagaan

Dalam aspek kelembagaan, indikator pelayanan pengelolaan sampah oleh lembaga terkait di Kota Kasongan dinilai masih belum responsif oleh masyarakat. Hasil wawancara dengan beberapa responden mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Salah satu warga menyatakan, *"kalau ada masalah soal sampah, susah menghubungi pihak yang berwenang. Kadang kami sudah lapor, tapi tidak ada tindak lanjut."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa respons lembaga terhadap keluhan atau laporan masyarakat masih lambat dan kurang ditindaklanjuti secara efektif.

Wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, petugas lapangan, dan perwakilan instansi pemerintah mengungkapkan kelemahan kelembagaan secara lebih struktural. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan, *"Koordinasi antarinstansi belum berjalan dengan baik. Kadang satu dinas tidak tahu apa yang sudah atau belum dilakukan oleh dinas lainnya."* Pernyataan ini mencerminkan lemahnya sinergi antarlembaga yang semestinya bekerja sama dalam pengelolaan sampah secara terpadu.

Selanjutnya, dari pihak petugas lapangan juga disampaikan bahwa lembaga belum memiliki sistem pemantauan kinerja yang terstruktur. Salah satu petugas mengungkapkan, *"Kami bekerja seadanya. Tidak ada sistem pelaporan yang jelas. Kadang kami bingung harus lapor ke siapa kalau ada kendala di lapangan."* Kendala ini menunjukkan bahwa belum tersedia sistem pelaporan atau evaluasi kerja yang sistematis, yang dapat memantau efektivitas layanan maupun menyelesaikan permasalahan secara tepat waktu. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa kelembagaan pengelolaan sampah di Kota Kasongan masih

bersifat reaktif dan belum didukung oleh sistem yang proaktif, terstruktur, dan saling terintegrasi.

Lemahnya aspek kelembagaan ini berdampak langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah secara keseluruhan. Ketidakjelasan struktur organisasi dan mekanisme koordinasi menyebabkan terjadinya fragmentasi tanggung jawab, duplikasi kegiatan, atau sebaliknya ada aspek yang terabaikan karena tidak ada instansi yang merasa bertanggung jawab. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi penggunaan sumber daya yang sudah terbatas, tetapi juga menurunkan akuntabilitas publik karena sulit mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan layanan. Dari perspektif good governance, absennya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur mengindikasikan lemahnya mekanisme checks and balances dalam pengelolaan sampah, yang berpotensi membuka ruang untuk praktik-praktik yang tidak profesional. Implikasi jangka panjang dari kondisi kelembagaan yang lemah ini adalah terhambatnya inovasi dan pembelajaran organisasi, karena tidak ada mekanisme sistematis untuk mendokumentasikan best practices maupun lessons learned dari implementasi program pengelolaan sampah (Hijab et al., 2025; Nainggolan et al., 2023).

Sehingga dari kurangnya responsivitas pelayanan dari lembaga pengelola sampah, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketiadaan sistem pelaporan dan pemantauan kerja yang terstruktur menjadi tantangan utama dalam aspek kelembagaan. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, dibutuhkan penguatan institusi melalui pembangunan sistem kerja yang jelas, peningkatan koordinasi, dan penyediaan saluran pelaporan yang responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat.

3. Pembiayaan

Terkait dengan retribusi sampah di Kota Kasongan, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara jelas tentang sistem retribusi yang diberlakukan. Ketidakjelasan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan sejumlah responden yang mengungkapkan bahwa proses penarikan biaya layanan pengelolaan sampah kurang transparan dan tidak disosialisasikan dengan baik. Warga merasa bingung apakah mereka harus membayar retribusi tersebut, berapa besarannya, serta bagaimana mekanisme pembayarannya. Kondisi ini membuat masyarakat kurang paham dan kurang percaya terhadap sistem pembiayaan yang berjalan.

Dalam wawancara, salah satu warga menyampaikan, *"Menurut saya, saya tidak tahu apakah ada biaya retribusi sampah yang harus dibayar. Tidak ada pemberitahuan resmi, jadi saya pikir layanan ini gratis."* Pernyataan ini menegaskan bahwa komunikasi mengenai retribusi sampah belum sampai ke masyarakat secara efektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kesan kurang profesional dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, warga juga tidak mengetahui kemana dana yang dikumpulkan dari retribusi tersebut disalurkan. Seorang responden lain menambahkan, *"Kalau pun ada pemungutan biaya, saya tidak tahu uangnya dipakai untuk apa. Apakah untuk perbaikan pelayanan atau hanya masuk kas daerah, kami tidak pernah diberi tahu."* Kondisi ini menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola layanan.

Ketidaktransparanan sistem pembiayaan pengelolaan sampah memiliki implikasi ganda

yang merugikan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi pemerintah daerah, ketidakjelasan retribusi mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran masyarakat, yang pada gilirannya menyebabkan keterbatasan sumber pendanaan untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan dimana layanan yang buruk membenarkan ketidakmauan masyarakat untuk membayar, sementara ketiadaan dana menyebabkan layanan tetap buruk atau bahkan menurun. Dari perspektif masyarakat sebagai warga negara yang berhak atas pelayanan publik yang berkualitas, ketidaktransparanan ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan mengurangi trust terhadap pemerintah daerah, yang dapat berimplikasi lebih luas terhadap legitimasi pemerintahan lokal. Lebih jauh lagi, dalam konteks partisipasi masyarakat, ketiadaan informasi yang jelas tentang retribusi dan penggunaannya menghambat pembentukan sense of ownership masyarakat terhadap program pengelolaan sampah, padahal ownership ini merupakan prasyarat penting untuk keberlanjutan program berbasis komunitas (Lestiani et al., 2022; Dewi & Hertati, 2025).

Padahal, pembiayaan yang jelas dan transparan sangat penting dalam mendukung keberlangsungan layanan pengelolaan sampah. Biaya yang terkumpul dari retribusi dapat digunakan untuk pemeliharaan armada pengangkut, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, ketidakjelasan sistem retribusi dan kurangnya transparansi penggunaan dana menjadi tantangan yang harus segera diatasi (Dewi & Hertati, 2025). Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai mekanisme retribusi dan pemanfaatan dana agar masyarakat merasa ikut memiliki dan mendukung sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

4. Peran Serta Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Kasongan masih tergolong pasif, terutama dalam hal keterlibatan langsung pada kegiatan pembersihan lingkungan. Data dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil warga yang aktif mengikuti kegiatan kerja bakti atau aksi gotong royong yang bertujuan membersihkan lingkungan sekitar. Sehingga, ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan belum optimal dan masih sangat terbatas pada kelompok tertentu saja.

Salah satu responden menyampaikan, *"Saya pikir tanggung jawab pengelolaan sampah sepenuhnya ada pada pemerintah. Kami hanya membuang sampah saja, sisanya urusan petugas."* Ungkapan responden ini memperlihatkan sikap ketergantungan masyarakat yang masih kuat terhadap peran pemerintah tanpa ada kesadaran akan pentingnya kontribusi pribadi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Kasongan mencerminkan permasalahan yang lebih fundamental terkait kesadaran lingkungan dan civic engagement. Sikap pasif dan ketergantungan penuh terhadap pemerintah ini mengindikasikan belum terbentuknya environmental citizenship, yaitu kesadaran sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab aktif terhadap keberlanjutan lingkungan. Implikasi dari rendahnya partisipasi ini bersifat multidimensional: pertama, dari aspek efektivitas pengelolaan, partisipasi masyarakat yang rendah menyebabkan program-program berbasis komunitas seperti pengomposan, pemilahan sampah di sumber, atau bank sampah

tidak dapat berjalan optimal, padahal pendekatan ini telah terbukti efektif mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA. Kedua, dari perspektif pembangunan berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu indikator pencapaian SDGs, khususnya target 11.6 tentang mengurangi dampak lingkungan negatif per kapita kota, termasuk memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan sampah. Ketiga, rendahnya partisipasi menunjukkan gap yang signifikan dalam program pendidikan dan kesadaran lingkungan, yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat (Alwi et al., 2025; Nainggolan et al., 2023).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah, yang berdampak pada efektivitas sistem pengelolaan sampah. Rendahnya partisipasi ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan warga, serta kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap isu lingkungan. Untuk itu, sangat diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, pemberian insentif atau penghargaan kepada warga yang aktif berpartisipasi juga dapat menjadi motivasi agar peran serta masyarakat dapat meningkat. Berdasarkan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat kegiatan pengelolaan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk semua.

5. Regulasi

Indikator terkait sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah di Kota Kasongan menunjukkan bahwa banyak warga belum mengetahui keberadaan aturan tersebut. Hasil ini tercermin dari wawancara yang mengungkapkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, sosialisasi yang dilakukan belum berjalan dengan optimal. Sebagian besar masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai peraturan daerah terkait kebersihan dan pengelolaan sampah, sehingga pengetahuan warga terhadap aturan tersebut sangat terbatas.

Dalam wawancara, seorang responden menyampaikan, *"Menurut saya, saya baru tahu kalau ada peraturan tentang sampah setelah mengikuti wawancara ini. Sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah."* Pernyataan ini menggambarkan minimnya penyebaran informasi yang menyentuh langsung ke masyarakat luas. Responden lain menambahkan, *"Kalau pun ada, sosialisasinya cuma lewat pengumuman di beberapa tempat saja, tidak sampai ke seluruh warga, terutama yang tinggal di daerah pinggiran."* Ungkapan ini menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dilakukan cenderung kurang tersebar dan tidak menjangkau semua lapisan masyarakat secara merata.

Lemahnya sosialisasi regulasi pengelolaan sampah mengindikasikan gap yang serius antara policy formulation dan policy implementation. Keberadaan regulasi tanpa disertai pemahaman dan kepatuhan masyarakat hanya akan menjadi "law in the books" tanpa efektivitas implementasi di lapangan. Implikasi dari kondisi ini adalah: pertama, regulasi yang tidak dipahami masyarakat tidak akan menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, atau membayar retribusi tepat waktu. Kedua, ketiadaan sosialisasi yang efektif menghambat enforcement atau penegakan aturan, karena masyarakat dapat berargumen bahwa mereka tidak mengetahui aturan yang dilanggar. Ketiga, dari perspektif partisipasi

publik, minimnya sosialisasi menunjukkan kurangnya upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan, padahal dalam teori good governance, transparansi informasi dan partisipasi publik merupakan prinsip fundamental. Keempat, gap informasi ini dapat menciptakan kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) yang lebih lebar antara kelompok masyarakat yang memiliki akses informasi dengan yang tidak, yang berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dalam akses terhadap lingkungan yang sehat (Husna & Ubaidillah, 2024).

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai peraturan daerah ini menandakan bahwa upaya sosialisasi yang selama ini dilakukan belum efektif dan perlu ditingkatkan.

6. Kinerja Pengelolaan Sampah

Kinerja pengelolaan sampah di Kota Kasongan dinilai berdasarkan tiga kategori, yaitu buruk (skor 1), kurang (skor 2), dan baik (skor 3). Penilaian ini didasarkan pada persepsi masyarakat yang telah menerima layanan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Tabel 2 menunjukkan hasil respon masyarakat terhadap berbagai aspek dalam pengelolaan sampah, yang mencerminkan sejauh mana sistem yang diterapkan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan warga.

Tabel 2. Respon Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Sampah di Kasongan

Aspek yang dinilai	Buruk (1)	Kurang (2)	Baik (3)	Jumlah responden	Rata rata Skor
Kinerja Pengelolaan sampah di Kasongan	14	80	6	100	1,92

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Berdasarkan data pada Tabel 2 mengenai respons masyarakat terhadap kinerja pengelolaan sampah di Kota Kasongan, terlihat bahwa dari 100 responden yang disurvei, sebagian besar memberikan penilaian kategori “kurang” terhadap kinerja sistem pengelolaan sampah yang ada. Secara rinci, sebanyak 80 responden menilai kinerja pengelolaan sampah tersebut dalam kategori kurang (skor 2), sementara 14 responden memberikan penilaian buruk (skor 1), dan hanya 6 responden yang menilai kinerja tersebut baik (skor 3).

Rata-rata skor yang diperoleh adalah 1,92, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa bahwa kinerja pengelolaan sampah di Kasongan belum memenuhi harapan dan masih perlu perbaikan. Penilaian ini mencerminkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurang optimalnya teknis operasional, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Rendahnya skor kinerja pengelolaan sampah (1,92 dari skala maksimal 3) dengan dominasi penilaian "kurang" (80%) dan "buruk" (14%) mengindikasikan adanya service quality gap yang signifikan antara ekspektasi masyarakat dengan kenyataan pelayanan yang diterima. Kondisi ini memiliki implikasi serius terhadap beberapa aspek: pertama, dari perspektif kesehatan masyarakat, pengelolaan sampah yang buruk berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit menular yang ditularkan melalui vektor seperti demam berdarah dengue (DBD), leptospirosis, dan diare, yang secara langsung berdampak pada peningkatan beban ekonomi

masyarakat untuk biaya kesehatan dan produktivitas yang hilang akibat sakit. Kedua, dari aspek lingkungan, kinerja pengelolaan sampah yang rendah menyebabkan akumulasi sampah di lingkungan yang dapat mencemari tanah, air permukaan, dan air tanah, serta menghasilkan emisi gas rumah kaca dari dekomposisi sampah organik yang tidak terkelola. Ketiga, dari perspektif sosial-ekonomi, lingkungan yang kotor dan tidak sehat menurunkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi nilai properti, dan dapat menciptakan stigma negatif terhadap wilayah yang menghambat investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Keempat, dari sudut pandang good governance, rendahnya kinerja ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga negara atas lingkungan yang sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi, yang dapat mengikis kepercayaan publik (public trust) terhadap pemerintah daerah secara keseluruhan (Damiti et al., 2024; Hadomuan & Tuti, 2022; Thamrin et al., 2022).

Data ini menjadi indikasi penting bahwa pengelolaan sampah di Kota Kasongan masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat efektivitas pelayanannya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan sistem pengelolaan sampah agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, salah satu implikasi penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja sistem pengelolaan sampah di Kota Kasongan adalah peran pemerintah dalam memperbaiki pelayanan teknis sekaligus memperkuat kelembagaan yang mengelola sampah. Peningkatan pelayanan teknis mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan fasilitas yang memadai, pengelolaan jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang lebih terorganisir, serta pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang lebih optimal (Damiti et al., 2024). Berdasarkan adanya pelayanan teknis yang lebih baik, proses pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efisien, sehingga masalah penumpukan dan keterlambatan pengangkutan sampah dapat diminimalisir.

Selain itu, penguatan kelembagaan juga menjadi faktor kunci dalam upaya ini. Kelembagaan yang kuat berarti adanya struktur organisasi yang jelas, koordinasi yang baik antarinstansi terkait, serta sistem pemantauan dan pelaporan yang terstruktur dan transparan. Dari kelembagaan yang diperkuat, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpadu dan profesional, sehingga berbagai hambatan operasional bisa diatasi dengan lebih efektif.

Selanjutnya, upaya peningkatan kinerja pengelolaan sampah di Kota Kasongan juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sekadar sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pelaku yang berperan langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah secara bertanggung jawab. Karena dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat mendorong kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar, sehingga partisipasi dalam kegiatan seperti kerja bakti, pemilahan sampah, dan pelaporan masalah kebersihan dapat meningkat (Alwi et al., 2025). Pendekatan partisipatif dari masyarakat penting karena pengelolaan sampah bukanlah tugas yang bisa dijalankan secara efektif hanya oleh pemerintah saja. Masyarakat sebagai sumber utama timbulan sampah harus menjadi mitra yang aktif dalam proses pengelolaan (Nainggolan et al., 2023). Melalui edukasi, pelatihan, serta komunikasi yang intensif, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengambil peran lebih besar, mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga hingga komunitas.

Selain itu, pendekatan partisipatif juga membuka ruang bagi pemerintah untuk menerima masukan dan kritik konstruktif dari masyarakat, sehingga kebijakan dan program pengelolaan sampah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan (Hijab et al., 2025).

Maka, keterlibatan masyarakat secara aktif melalui pendekatan partisipatif akan memperkuat efektivitas dan keberlanjutan sistem pengelolaan sampah, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh warga Kota Kasongan.

Upaya selanjutnya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Kasongan, sosialisasi peraturan terkait pengelolaan sampah perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah (Husna & Ubaidillah, 2024). Pemahaman yang baik terhadap aturan akan mendorong warga untuk lebih patuh dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sehari-hari. Pelaksanaan sosialisasi secara rutin juga berfungsi sebagai pengingat dan penyegaran bagi masyarakat, sehingga mereka tetap waspada dan tidak mengabaikan kewajiban dalam membuang sampah pada tempatnya, mengikuti jadwal pengumpulan, serta berpartisipasi dalam program-program kebersihan yang ada.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan secara berkala dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat secara merata, termasuk kelompok yang selama ini kurang terinformasi seperti warga di daerah pinggiran atau kelompok rentan. Metode sosialisasi pun perlu bervariasi dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, seperti melalui pertemuan komunitas, media sosial, papan pengumuman, maupun kegiatan edukasi di sekolah-sekolah. Berdasarkan adanya komunikasi yang efektif dan berkelanjutan, masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan mendukung keberhasilan program pemerintah di Kota Kasongan.

Kemudian, sistem retribusi pengelolaan sampah di Kota Kasongan perlu dibuat lebih transparan guna membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan layanan tersebut. Transparansi dalam sistem retribusi berarti bahwa seluruh proses pemungutan biaya, pengelolaan dana, hingga penggunaan anggaran harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dampaknya warga dapat mengetahui secara pasti bagaimana dana yang mereka bayarkan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah (Lestiani et al., 2022).

Ketika masyarakat merasa bahwa retribusi yang mereka bayar dikelola dengan jujur dan benar, rasa kepercayaan dan dukungan terhadap sistem pengelolaan sampah akan meningkat. Kepercayaan ini sangat penting karena akan mendorong warga untuk lebih patuh dalam membayar retribusi dan ikut aktif dalam program kebersihan lingkungan. Sebaliknya, ketidakjelasan dan kecurigaan terhadap pengelolaan dana seringkali menyebabkan ketidakpercayaan, yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dan menghambat keberhasilan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan, misalnya dengan memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat mengenai jumlah dana yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut digunakan. Selain itu, penerapan sistem administrasi yang rapi dan mudah diakses juga dapat memperkuat akuntabilitas.

Kemudian, dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan sampah di Kota Kasongan, penting untuk mempertimbangkan berbagai temuan dari penelitian terdahulu, salah satunya adalah hasil penelitian Triani (2017). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kinerja layanan persampahan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang hingga kini masih

menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah secara efektif.

Pertama, jumlah personil dan sarana prasarana yang tersedia masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan kapasitas pengelolaan sampah menjadi kurang maksimal karena tenaga dan alat yang ada tidak cukup untuk menangani volume sampah yang terus meningkat. Kedua, operasional pengangkutan sampah juga belum berjalan secara optimal, sehingga sering terjadi keterlambatan dan ketidakteraturan dalam pengangkutan sampah dari lokasi penimbunan ke tempat pembuangan akhir. Ketiga, pembagian tugas antar petugas, terutama dalam sistem pengumpulan dan pengangkutan, masih kurang jelas dan belum terorganisir dengan baik. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas atau malah ada aspek yang terabaikan, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses pengelolaan sampah. Keempat, kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah masih tergolong rendah, sehingga partisipasi aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menjalankan peraturan terkait sampah belum optimal.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, maka evaluasi menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem pengelolaan sampah yang sedang berjalan. Selanjutnya, menerapkan upaya-upaya optimalisasi yang terarah dan terpadu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah di Kota Kasongan. Optimalisasi ini dapat melibatkan perbaikan teknis dan manajerial, peningkatan peran serta masyarakat, penguatan sistem kelembagaan, serta perbaikan faktor yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah secara efektif. Jika upaya-upaya tersebut berhasil dilaksanakan secara konsisten, maka pengelolaan sampah di Kota Kasongan akan menjadi lebih berkelanjutan, memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga. Dampak ini tentunya juga sejalan dengan tujuan pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan sampah di Kota Kasongan dinilai belum optimal oleh mayoritas masyarakat, dengan 80 responden memberikan penilaian “kurang” dan 14 responden “buruk”, serta hanya 6 responden yang menilai “baik”. Aspek teknik operasional seperti pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan berada pada kategori sedang, sedangkan kelembagaan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan regulasi belum sesuai dengan harapan berdasarkan hasil wawancara. Temuan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai kendala struktural dan fungsional dalam sistem pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan melalui perbaikan tata kelola kelembagaan, transparansi pembiayaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan regulasi dan pengawasan agar sistem pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah yang terbatas hanya di Kota Kasongan serta metode yang berfokus pada persepsi masyarakat tanpa melibatkan data teknis operasional secara lebih mendalam. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian yang lebih komprehensif dengan melibatkan pemetaan kuantitatif sarana prasarana, analisis kinerja petugas lapangan, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *8*(1), 729–738.

Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Aisha, N. W. (2023). Pengaruh bank sampah terhadap jumlah sampah plastik di Indonesia. *Jurnal Alternatif-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 14*(1), 1–15.

Alwi, F. W. U., Rizka, H. V., Azizah, M., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat, 2*(4), 912–922.

Anastasia, B. W., & Arif, L. (2022). Strategi pengelolaan sampah di Kota Mojokerto dalam perspektif analisis strengths, opportunities, aspirations, results. *Sumber, 122*, 44–634.

Damiti, R. A., Lihawa, F., & Baderan, D. W. K. (2024). Peranan pemerintah daerah dalam keberlanjutan TPS3R di Provinsi Gorontalo. *Journal of Creative Student Research, 2*(6), 225–237. https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v2i6.4654

Dewi, D. A. P., & Hertati, D. (2025). Public private partnership dalam pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir Mrican Kabupaten Ponorogo. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8*(7), 8234–8239.

Diyah, H., Ramadani, T. P., Lutfi, D. K. R., Sulaeman, D. R., Ariza, S., & Hamka, H. (2025). Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara Melalui Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Lingkup Kolaborasi di Kelurahan Petamburan. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, *7*(1), 23–38.

Erika, E., & Gusmira, E. (2024). Analisis dampak limbah sampah rumah tangga terhubung pencemaran lingkungan hidup. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(3), 90–102.

Fandira, W., Solistiyowati, M., & Sibuea, T. (2023). Circular Economy: Strategi Utama Dukung Sustainable Development Goals (SDGs) guna Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, *3*(1), 44–54.

Gobai, K. R. M., Surya, B., & Syafri, S. (2020). Kinerja pengelolaan sampah perkotaan: Studi kasus Kota Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Urban and Regional Studies Journal, 2*(2), 37–45.

Hakim, Y. N., & Abdullah, S. (2024). Kinerja Pengelolaan Sampah pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis (Studi di Kecamatan Mandau). *Journal of Public Administration Review*, *1*(1), 588–612.

Hadomuan, M. T., & Tuti, R. W. (2022). Evaluasi kebijakan terhadap pengelolaan sampah kawasan dan timbulan di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13*(1), 7–14. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.4504

Hijab, M., Rahmawati, R., & Sudarsa, A. S. (2025). Kepemimpinan fasilitatif camat dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui tata kelola inovasi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7*(4), 2699–2713.

https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1572

Husna, A., & Ubaidillah, N. (2024). Sosialisasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3*(2), 145–161. https://doi.org/10.53429/ngaliman.v3i2.1344

Kasyfilham, F., & Al Akbar, N. (2025). Evaluasi Tata Kelola Sampah Yogyakarta Pasca-Piyungan: Studi Komparatif dengan Model Ekonomi Sirkular Banyumas. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, *10*(1), 152–181.

Kurniawan, A., & Fuaddah, A. (2024). Memberdayakan Rumah Tangga untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kesadaran Masyarakat di Kota Semarang. *Journal of Urban Sociology*, *1*(2), 112–122.

Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Syahida, H. N., Sitorus, C., & Shahron, S. (2024). Sampah di Indonesia: Tantangan dan solusi menuju perubahan positif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 12235–12247.

Lestiani, K., Jati, D. R., & Jumiati, J. (2022). Analisis kesediaan membayar (willingness to pay) masyarakat Kecamatan Sambas terhadap biaya retribusi kebersihan. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 10*(2), 164–173.

Nainggolan, E. L., Lodan, K. T., & Salsabila, L. (2023). Menuju keberlanjutan lingkungan: Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah Kota Batam. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9*(2), 179–188. https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13584

Pida, D. F., Aini, K. N., & Putri, C. A. (2025). Dampak urbanisasi terhadap perkembangan kota di Indonesia: Tinjauan dari aspek ekonomi pembangunan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *3*(1), 226–238.

Rafi, P., & Perkasa, M. N. (2023). Dampak kerusakan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik berdasarkan tinjauan UU No. 18 Tahun 2008. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(7), 1420–1425.

Rahmatullah, S., & Verawati, N. N. S. P. (2024). Pengelolaan Sampah Plastik dengan Metode Ecobrick sebagai Upaya Mendukung SDGs ke-12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Wicara Desa*, *2*(6), 536–542.

Rahmawati, A. F., & Syamsu, F. D. (2021). Analisis pengelolaan sampah berkelanjutan pada wilayah perkotaan di indonesia. *Jurnal Binagogik*, *8*(1), 1–12.

Sari, C. N., Al-illahiyah, L. H., Kaban, L. B., Hasibuan, M. R., Nasution, R. H., & Sari, W. F. (2023). Keterbatasan Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Dan Tantangan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Desa Jandi Meriah Kec. Tiganderket Kab. Karo). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *3*(2), 268–276.

Sari, M. (2021). *Kajian pusat pertumbuhan dan wilayah hinterland di kabupaten Siak*. Universitas Islam Riau.

Sari, D. K., & Mardiansjah, F. H. (2022). Perkembangan kota-kota kecil di Kabupaten Banyumas dan potensi penguatan perannya dalam keterkaitan desa kota. *Jurnal Tata Kota dan Daerah, 14*(2), 115–126.

Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). *Sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN)*. Diakses dari https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/#parallax

Susilawati, R., Andriansah, Z., Erhassa, S. N., Fitri, N. I., & Jamaluddin, W. (2024). Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pendidikan Agama Islam.

MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah, *9*(2), 76–91.

Thamrin, H., Dunggio, I., & Rahim, S. (2022). Evaluasi pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. *Jambura Edu Biosfer Journal, 4*(1), 44–55. https://doi.org/10.34312/jebj.v4i1.14421

Triani, E. (2017). *Optimalisasi kinerja pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya* (Tesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember).

Wati, L., Brata, J. T., & Bariun, L. O. (2025). Penerapan Fungsi Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(2), 2991–2999.

Widyastuti, S., Utami, R. O. T., Ratnawati, R., & Wiyarno, Y. (2024). Perancangan bangunan pengolahan sampah terpadu (TPST) di Desa Turirejo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. *Jurnal Plano Buana, 5*(1), 47–58.

Yacadewa, A., & Musa'ad, M. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kebijakan Publik, 4*(3), 124–142.

Yuliana, D. (2025). Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Peningkatan Tata Kelola Sampah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *3*(1), 94–103.

World Bank. (2018). *What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)